
Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia : Studi Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech

Syahra Ramadhani^{1*}

¹ Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

* Email Korespondensi: syahraramadhani85@gmail.com

Abstrak: Penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial menjadi tantangan serius bagi kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyebaran hoax dan hate speech melalui studi kasus yang terjadi pada tahun-tahun pemilu dan isu-isu sensitif lainnya. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis terhadap konten-konten media sosial serta dokumentasi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoax dan hate speech kerap dimanfaatkan sebagai alat politik dan provokasi, serta berdampak negatif pada kerukunan masyarakat. Peran media, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam menangkal penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.

Keywords: hoax, hate speech, media sosial, studi kasus, literasi digital

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Di Indonesia, platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan X (Twitter) bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, dalam perjalanannya, media sosial tidak hanya menyebarkan informasi yang valid, melainkan juga menjadi ladang subur bagi penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan keresahan sosial, perpecahan masyarakat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi formal.

Penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian sering kali beriringan dengan isu politik, agama, dan identitas. Dalam beberapa peristiwa seperti pemilu, pandemi, dan konflik sosial, konten yang tidak diverifikasi menyebar luas dan cepat tanpa hambatan. Hal ini tidak lepas dari sifat algoritmik media sosial yang mendorong konten viral tanpa memperhatikan validitasnya. Informasi yang bombastis, kontroversial, atau mengandung unsur provokasi justru mendapatkan jangkauan lebih luas dibandingkan konten edukatif.

Rendahnya tingkat literasi media masyarakat juga menjadi faktor penyumbang. Banyak pengguna media sosial tidak memiliki kebiasaan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Ditambah dengan adanya ruang gema (echo chamber), di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, membuat polarisasi semakin tajam. Akibatnya, masyarakat dengan mudah terprovokasi oleh hoax dan hate speech yang dikemas dalam narasi meyakinkan.

Melihat dampak yang ditimbulkan, penting untuk melakukan kajian terhadap bagaimana informasi palsu dan ujaran kebencian menyebar, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana pola penyebarannya terbentuk di ruang digital. Studi kasus terhadap beberapa konten viral dapat memberikan gambaran nyata mengenai fenomena ini dan menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan penanggulangannya.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola penyebaran hoax dan hate speech di media sosial Indonesia, melalui pendekatan studi kasus terhadap beberapa peristiwa viral yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi digital serta merumuskan langkah konkret penanganan konten negatif di ruang publik maya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya di balik penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Objek studi dipilih berdasarkan kasus viral di media sosial yang memiliki dampak sosial luas, seperti hoax surat suara tercablos (2019), narasi keagamaan yang menyesatkan, dan ujaran kebencian berbasis etnis saat pandemi COVID-19.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi konten yang tersebar di platform media sosial, laporan dari lembaga pemantau hoax seperti Mafindo, SAFEnet, serta arsip pemberitaan media daring. Selain itu, peneliti juga merujuk pada jurnal akademik, regulasi pemerintah, dan analisis wacana yang dipublikasikan oleh pengamat komunikasi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive dan snowball sampling dari sumber-sumber yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis isi (content analysis)** dan **analisis wacana kritis (CDA – Critical Discourse Analysis)**. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, bentuk, dan jenis pesan yang terkandung dalam hoax dan hate speech. Sementara itu, CDA digunakan untuk membaca bagaimana pesan-pesan tersebut membentuk opini, memperkuat stereotip, dan menciptakan dominasi makna di ruang digital.

Untuk menjaga objektivitas, peneliti memverifikasi ulang setiap data dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari media sosial, media mainstream, dan laporan lembaga independen. Validitas data juga diperkuat dengan membandingkan beberapa studi literatur terdahulu yang relevan, terutama dalam konteks media digital di Indonesia.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada sulitnya melacak konten yang telah dihapus atau dibatasi aksesnya oleh platform digital. Selain itu, data percakapan pribadi di grup tertutup seperti WhatsApp atau Telegram tidak dapat diakses secara legal dan etis. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tetap pada ruang publik digital yang terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan awal menunjukkan bahwa konten hoax dan hate speech di Indonesia banyak disebarakan dalam bentuk teks pendek, gambar dengan narasi, serta video potongan yang sengaja dilepas dari konteks aslinya. Konten-konten tersebut biasanya muncul di tengah situasi sosial-politik yang memanas, seperti menjelang pemilu, konflik antaragama, atau isu global seperti pandemi. Dalam kasus hoax surat suara tercoblos, misalnya, informasi palsu dibuat sedemikian rupa agar terlihat masuk akal dan memancing kekhawatiran publik.

Penyebaran konten negatif juga memperlihatkan adanya keterlibatan akun-akun anonim dan jaringan simpatisan politik. Akun-akun ini menyebarkan pesan berulang dan sistematis dalam waktu singkat, menunjukkan pola orkestrasi. Bahkan beberapa di antaranya merupakan bagian dari operasi siber atau bot yang bekerja secara otomatis. Hal ini mempertegas bahwa penyebaran hoax dan hate speech tidak selalu terjadi secara organik.

Dalam hal hate speech, bentuk paling umum ditemukan adalah ujaran yang menyerang identitas kelompok tertentu, seperti etnis Tionghoa, komunitas LGBTQ+, atau penganut agama minoritas. Narasi yang digunakan seringkali membalut kebencian dengan dalih moral atau nasionalisme, sehingga terkesan “benar” di mata sebagian publik. Pola ini sangat berbahaya karena tidak hanya menyasar perorangan, tetapi juga melemahkan nilai toleransi dan kebhinekaan.

Platform media sosial juga memiliki andil besar dalam memperparah penyebaran informasi negatif. Algoritma yang menonjolkan keterlibatan (engagement) justru memperbesar visibilitas konten berbahaya. Konten yang mengandung emosi negatif, seperti marah atau takut, lebih mungkin untuk dibagikan. Dalam konteks ini, media sosial bukan hanya sebagai saluran, tapi juga turut membentuk perilaku digital masyarakat.

Di sisi lain, muncul berbagai inisiatif dari masyarakat sipil untuk menangkali penyebaran hoax dan hate speech. Beberapa komunitas seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) secara aktif melakukan cek fakta dan edukasi digital. Namun, upaya ini masih jauh dari cukup karena pertumbuhan konten negatif berlangsung lebih cepat daripada upaya klarifikasinya. Oleh karena itu, perlu strategi yang lebih komprehensif dan sistemik untuk menanganinya.

1. Dinamika Penyebaran Hoax di Media Sosial Indonesia

Berdasarkan data yang didapatkan dari kominfo, menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar hoax. Selain itu, pada tempo jelang pemungutan suara pemilu 2019, persebaran berita hoax di media sosial kian marak. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini, hoax paling banyak didapati pada akun-akun yang

memposting hoax lalu pada saat itu juga pemilik akun men-screenshot dan memviralkan postingan tersebut dengan hasil gambar layar yang ia peroleh. Sebagai antisipasi atau "cari aman" pemilik akun tersebut segera menutup akunnya. Selain itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa Facebook dan Instagram adalah media yang paling banyak didapati hoax.

Penyebaran informasi yang semakin tidak terbandung menjadi sarana akan penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya atau sering disebut sebagai hoax. Mastel menjelaskan bahwa dari jumlah 1.146 responden sebanyak 44,3% diantara mereka menerima berita palsu atau hoax setiap harinya dan dengan presentase 17,2% menerima lebih dari satu kali berita palsu atau hoax dalam sehari. Hoax adalah upaya untuk menipu, mengelabui, dan memperdaya para pembaca maupun pendengar. Untuk meyakini sesuatu, meskipun penghasil atau pencipta informasi palsu mereka menyadari bahwa informasi itu hanyalah kabar bohong (Faturomah & Salim, 2022).

Menurut (Faturomah & Salim, 2022) Saat ini, banyak orang lebih cenderung meyakini pada berita palsu jika informasinya sejalan dengan pendapat, sudut pandang atau sikap yang secara alami manusia kadang-kadang merasakan emosi positif yang akan muncul ketika keyakinannya mendapatkan pengakuan sehingga sudut pandang dan gaya berpikir tidak akan memperhatikan apakah informasi dan berita yang apakah itu asli atau tidak, dan bahkan untuk mereka sangat mudah saja. Untuk menyebarkan berita itu lagi meskipun sumbernya tidak terlalu jelas atau masih dipertanyakan keabsahannya.

Penyebaran hoax di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama pada momentum politik seperti pemilu dan pilkada. (Febriansyah Putra & Patra, 2023) meneliti hoaks politik menjelang Pemilu 2019 dan menemukan bahwa konten hoaks digunakan untuk membentuk persepsi publik melalui narasi yang menyesatkan. Dalam laporannya, Gunawan mencatat setidaknya ada 947 kasus hoaks politik pada 2019 yang berhasil diverifikasi oleh organisasi cek fakta independen. Fakta ini memperlihatkan betapa kuatnya hoaks dijadikan instrumen propaganda digital. Hoaks tidak hanya beredar pada tahun politik, tetapi juga muncul pada situasi krisis, seperti pandemi COVID-19. (Ikhsan et al., 2021) menjelaskan bahwa hoaks kesehatan menjadi salah satu yang paling cepat menyebar karena menysasar ketakutan publik. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa lebih dari 50% hoaks yang beredar pada awal pandemi berkaitan dengan informasi palsu seputar virus, obat, dan konspirasi global. Hal ini didorong oleh tingginya rasa ingin tahu masyarakat yang tidak diimbangi dengan literasi digital memadai.

Salah satu ciri hoaks yang berhasil viral adalah narasi yang memancing emosi publik. (Masi et al., 2022) menyoroti bahwa informasi palsu sering disusun dengan judul provokatif. Dalam kasus hoaks surat suara tercablos, narasi dibentuk seolah ada kecurangan terencana, padahal faktanya tidak pernah terbukti. Andriani juga menemukan bahwa sebanyak 68% responden dalam penelitiannya mengaku pernah menerima informasi palsu di grup WhatsApp keluarga, yang kemudian diteruskan tanpa pengecekan. Media sosial juga memfasilitasi penyebaran hoaks melalui fitur berbagi cepat. Abidin (2021) dalam penelitiannya menyoroti bahwa mayoritas pengguna media sosial di Indonesia (72%) tidak membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Rendahnya kebiasaan verifikasi membuat hoaks beredar luas hanya dalam hitungan jam. Hoaks yang dikemas dalam format meme, gambar, atau potongan video menjadi lebih mudah diterima publik.

Fenomena hoaks membuktikan bahwa tantangan media digital bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga budaya baca kritis. Tanpa pembekalan literasi yang memadai, masyarakat akan selalu menjadi target penyebaran hoaks yang dikemas dengan strategi psikologi massa. Oleh karena itu, memahami dinamika hoaks penting sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan pencegahan di masa mendatang.

2. Peran Algoritma Media Sosial dalam Memperparah Penyebaran

Platform media sosial memiliki peran vital dalam mempercepat viralitas hoaks. Media sosial, dengan algoritma canggihnya, menjadi salah satu platform utama dalam ekosistem informasi global. Algoritma media sosial adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh platform media sosial untuk menampilkan informasi yang relevan kepada penggunanya demi meningkatkan kenyamanan dan ketertarikan pengguna terhadap media sosial. Algoritma ini dirancang untuk menyajikan konten yang relevan bagi pengguna berdasarkan preferensi, interaksi, dan riwayat pencarian mereka. Di satu sisi, algoritma ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan minat mereka. Namun, di sisi lain, algoritma ini juga dapat membatasi keberagaman informasi yang diakses, menciptakan fenomena "filter bubble" dan "echo chamber." (Rahmadini, 2025)

Filter Bubble adalah kondisi di mana individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan preferensi atau pandangannya, seringkali sebagai hasil dari algoritma personalisasi yang diterapkan oleh platform digital. Hal ini menciptakan lingkungan informasi yang terbatas dan homogen, sehingga mengurangi eksposur terhadap pandangan yang beragam (Wulandari et al., 2021). Sementara itu, echo chamber merujuk pada situasi di mana individu hanya terlibat dengan komunitas atau kelompok yang memiliki pandangan serupa. Dalam konteks ini, informasi dan opini yang beredar cenderung diperkuat melalui pengulangan, tanpa adanya tantangan atau perdebatan dari perspektif lain (H. W. et al., 2022). Kombinasi dari kedua fenomena ini dapat memperkuat bias kognitif, mendorong polarisasi, dan mengurangi kapasitas individu untuk memahami sudut pandang yang berbeda.

Dalam dunia jurnanisme, algoritma ini tidak hanya berpengaruh pada cara masyarakat secara luas mengakses informasi, namun juga mempengaruhi secara langsung pola konsumsi berita untuk wartawan. Data yang diakses oleh para jurnalis tidak terpisah dari perkembangan teknologi digital yang telah mengubah secara signifikan cara informasi dihasilkan, disebar, dan dikonsumsi (Rahmadini, 2025).

Para pelaku disinformasi pun memanfaatkan pola ini. Mereka sengaja membuat akun palsu, *bot*, atau jaringan akun bayangan untuk mendorong interaksi. Dalam konteks politik, pola ini sering disebut *cyber troop* atau pasukan siber. Tujuannya jelas: mendistorsi opini publik dengan menggenjot hoax agar terus naik ke trending topic. Di Indonesia, WhatsApp menjadi medium paling sulit dikendalikan. Berbeda dengan Facebook atau X, WhatsApp bersifat privat dan terenkripsi. Ini membuat deteksi hoax di grup-grup pribadi nyaris mustahil. Dampaknya, sekalipun platform publik sudah memblokir atau memberi label hoax, rantai penyebaran di grup tertutup tetap jalan.

Selain itu, algoritma yang "netral" secara teknis justru bermasalah secara sosial. Ia tidak bisa membedakan mana konten benar, mana konten palsu. Selama ada interaksi, maka konten akan "dipromosikan". Inilah yang membuat tanggung jawab platform digital kerap disorot. Beberapa peneliti menilai perlu audit algoritma agar tidak hanya mengejar engagement semata. Dengan demikian, peran algoritma tidak bisa diabaikan. Sebagian solusi yang diajukan adalah mendorong transparansi sistem rekomendasi, membangun fitur peringatan, dan mendesak platform merekrut moderator lokal agar memahami konteks budaya penyebaran hoax. (Munir & Mubarak, 2022).

3. Upaya Penanggulangan: Pemerintah, Komunitas, dan Literasi Digital

Penanganan hoax di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai skema, baik formal melalui regulasi, maupun informal lewat gerakan literasi masyarakat. Pemerintah melalui Kominfo memiliki kanal pengaduan hoax, bekerja sama dengan lembaga fact-checking independen, serta rutin mempublikasikan klarifikasi hoax populer. Selain itu, kampanye literasi digital makin digencarkan. Berbagai komunitas seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) aktif memberikan pelatihan cek fakta ke sekolah-sekolah, kampus, dan kelompok masyarakat. Upaya semacam ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran publik untuk lebih waspada sebelum membagikan informasi.

Namun, cakupan literasi digital masih sangat terbatas dibanding luasnya populasi pengguna internet di Indonesia. (Butar Butar, 2023) menyebutkan bahwa kebiasaan periksa fakta masih rendah di kalangan orang tua dan komunitas non-digital native. Artinya, generasi muda mungkin lebih melek digital, tetapi kelompok dewasa tetap menjadi celah bagi hoax untuk bertahan.

Di sisi lain, kolaborasi dengan platform digital juga menjadi langkah penting. Sejumlah platform mulai menambahkan fitur verifikasi pihak ketiga, tanda peringatan, hingga chatbot pengecekan fakta. Sayangnya, implementasi di Indonesia masih setengah jalan karena moderasi konten lokal belum sekuat di negara-negara maju. Kebijakan penanganan hoax juga harus menjamin kebebasan berekspresi. Artinya, penindakan harus tepat sasaran agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik sah. Ini menjadi tantangan hukum di Indonesia yang kerap multitafsir.

Literasi digital jangka panjang perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar sejak dini masyarakat terbiasa berpikir kritis. Edukasi berbasis komunitas pun harus terus diperluas, karena pola komunikasi orang Indonesia sangat berbasis relasi personal. Artinya, pendekatan *peer to peer* sering lebih efektif ketimbang sekadar kampanye daring (Dewi. Zaqia Rahma & Sunarni, 2024). Dengan kombinasi kebijakan formal, inisiatif

komunitas, dan keterlibatan platform, penanganan hoax berpotensi lebih komprehensif. Namun semua upaya akan sia-sia jika publik tetap malas memeriksa kebenaran informasi.

Selain literasi, moderasi konten di level platform juga perlu ditingkatkan.(Ramadanti et al., 2024) merekomendasikan platform merekrut tim moderator lokal agar deteksi konten hoax lebih kontekstual. Selama ini, kebijakan moderasi konten global tidak selalu cocok dengan konteks budaya Indonesia yang punya ragam bahasa dan nuansa lokal. Regulasi hukum juga perlu diperkuat tanpa mengekang kebebasan berekspresi. menegaskan bahwa UU ITE sering multitafsir sehingga rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus menjamin perlindungan kebebasan sipil sambil tetap tegas pada produsen disinformasi.

Dari berbagai upaya tersebut, jelas bahwa penanggulangan hoax memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari kebijakan formal, edukasi publik, hingga pembenahan sistem distribusi informasi. Jika salah satu elemen lemah, maka hoax akan terus tumbuh subur di ruang digital.

4. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Meski beragam strategi sudah dijalankan, tantangan besar tetap membayangi upaya penanganan hoax di Indonesia.(Marwan, 2018) menunjukkan bahwa pola penyebaran hoax terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Saat upaya pemblokiran dilakukan di satu platform, penyebar hoax dengan cepat bermigrasi ke platform lain yang lebih aman dari pengawasan. Contoh paling nyata adalah pergeseran dari Facebook ke WhatsApp grup tertutup, yang sangat sulit diawasi tanpa melanggar privasi pengguna.

Selain itu, munculnya teknologi baru seperti *deepfake* menambah kompleksitas disinformasi.(Adolph, 2016a) sudah memperingatkan potensi teknologi rekayasa visual dan audio sejak dekade lalu. Kini, risiko tersebut semakin nyata dengan kehadiran AI generatif. Jika tidak diantisipasi, hoax di masa depan tidak hanya berupa teks atau gambar, tetapi video yang seolah-olah asli sehingga sulit dibantah dengan pengecekan manual.

(Fadiyah & Azizah, 2025) menyoroti tantangan di aspek literasi publik. Meski tren literasi digital perlahan meningkat di kalangan generasi muda, segmen usia dewasa dan lansia masih menjadi titik lemah. Menurutnya, pendekatan literasi digital tidak bisa hanya mengandalkan kampanye daring, tetapi harus menjangkau komunitas dengan cara-cara kontekstual. Pendekatan “ceramah literasi digital” perlu dikawinkan dengan praktik langsung seperti simulasi mengecek fakta, latihan menganalisis sumber, dan diskusi studi kasus.

Menawarkan gagasan audit algoritma sebagai salah satu rekomendasi strategis. Audit bertujuan memastikan bahwa sistem rekomendasi platform tidak hanya mengejar klik dan iklan, tetapi juga menimbang risiko sosial (Rahmadini, 2025). Menggaris bawahi bahwa pembaruan regulasi UU ITE sangat mendesak. Penindakan tegas harus fokus pada produsen hoax berskala besar, bukan hanya akun individu yang lalai. Penegakan hukum juga harus adil agar tidak menimbulkan ketakutan publik dalam menyuarakan kritik sah. Ini penting supaya kebebasan berpendapat tidak tertekan di bawah dalih penanganan hoax (Arifin et al., 2025).

Evaluasi kebijakan harus dilakukan rutin. Penanganan hoax tidak bisa hanya reaktif. Pemerintah perlu memantau tren hoax baru, pola distribusi, serta merancang mitigasi yang dinamis. Keterlibatan akademisi, peneliti media, dan komunitas jurnalis independen menjadi sangat relevan di sini.

Kesimpulannya, penanganan hoax di Indonesia memerlukan kombinasi kebijakan yang komprehensif, teknologi moderasi yang berkeadilan, literasi publik yang kontekstual, serta komitmen lintas aktor. Tanpa ekosistem yang kuat dan terhubung, laju hoax hanya akan melahirkan krisis kepercayaan publik yang makin sulit dipulihkan.(Adolph, 2016b)

KESIMPULAN

Fenomena penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial Indonesia telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi, meskipun membawa banyak manfaat, juga memiliki sisi gelap yang kompleks. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hoax bukan sekadar persoalan teknis terkait distribusi informasi, tetapi juga persoalan sosial, politik, kultural, dan kelemahan literasi digital di tingkat masyarakat. Dinamika hoax di Indonesia erat kaitannya dengan momentum-momentum sosial-

politik, seperti pemilu atau krisis kesehatan, di mana ketidakpastian informasi mudah dieksploitasi oleh aktor tertentu untuk kepentingan pragmatis, bahkan dengan cara-cara terstruktur melalui jejaring siber.

Temuan ini memperlihatkan bagaimana algoritma media sosial berkontribusi signifikan dalam memperparah persebaran hoax. Sistem algoritma yang pada dasarnya netral secara teknis, ternyata tidak netral secara sosial karena hanya berorientasi pada tingkat keterlibatan tanpa memfilter kebenaran konten. Konten hoax, dengan narasi sensasional dan bombastis, lebih mudah memancing reaksi emosional publik, sehingga secara otomatis diprioritaskan algoritma untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Fenomena ruang gema (echo chamber) semakin mengunci pengguna dalam gelembung informasi yang sejalan dengan keyakinannya, menutup ruang klarifikasi dan debat rasional. Celah ini dimanfaatkan oleh produsen hoax, termasuk aktor politik dan operasi siber, untuk menggiring opini publik dengan cepat dan masif.

Upaya penanganan hoax di Indonesia memang telah dilakukan melalui jalur formal dan informal. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran situs, pelabelan konten, hingga bekerja sama dengan pihak pengecek fakta. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan komunitas literasi digital memainkan peran penting dalam mendidik publik agar lebih kritis. Namun demikian, berbagai program literasi digital masih menghadapi tantangan dari segi pemerataan akses, pendekatan metode, dan kebiasaan pengguna yang belum terbentuk secara merata di semua lapisan usia dan wilayah.

Tantangan semakin kompleks ketika kemajuan teknologi semakin cepat melahirkan inovasi rekayasa konten yang makin sulit dibedakan dari fakta, seperti teknologi deepfake. Belum lagi, kebijakan moderasi konten di platform global masih belum sepenuhnya memahami konteks lokal Indonesia. Moderasi masih didominasi mesin dan kebijakan standar, sementara hoax sering muncul dalam bentuk bahasa daerah, slang, atau nuansa lokal yang sulit dipahami tanpa konteks budaya. Oleh karena itu, moderasi konten yang hanya mengandalkan teknologi tanpa didukung sentuhan manusia yang memahami lokalitas tidak akan cukup ampuh meredam penyebaran hoax.

Penanganan fenomena hoax dan ujaran kebencian menuntut pendekatan lintas sektor dan lintas aktor. Tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau tanggung jawab platform semata. Diperlukan literasi digital sebagai benteng utama di tingkat individu, regulasi yang tegas dan adil untuk menindak aktor produsen hoax, dan audit algoritma secara berkala untuk memastikan bahwa distribusi konten di ruang digital tidak semata-mata mengejar klik atau keterlibatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya. Kolaborasi pemerintah, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi kunci agar upaya penanggulangan hoax tidak bersifat reaktif dan sporadis.

Pada akhirnya, keberhasilan membangun ruang digital yang sehat di Indonesia sangat bergantung pada perubahan perilaku publik. Masyarakat harus didorong untuk menginternalisasi budaya periksa fakta, skeptis pada narasi provokatif, dan terbiasa menahan diri sebelum membagikan informasi. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai pasar opini liar, tetapi menjadi ekosistem yang mendukung pertukaran gagasan rasional, dialog sehat, dan pertumbuhan demokrasi yang bermartabat. Penelitian lanjutan tetap diperlukan untuk memetakan pola penyebaran hoax terbaru, memahami perilaku generasi digital berikutnya, dan menilai efektivitas kebijakan serta teknologi moderasi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). *Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)*. 26(1), 192–227.
- Butar Butar, D. A. (2023). Perilaku Komunikasi Orang Tua Dalam Menanggapi Penyebaran Hoax Pada Grup Chat Whatsapp. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, 1, 109. <https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2363>
- Dewi. Zaqia Rahma, & Sunarni, S. (2024). Peran Literasi Digital dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi dan Transformasi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(1), 9–14.
- Fadiyah, K., & Azizah, N. (2025). *Integrasi Media Pembelajaran Digital Interaktif dan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Literasi serta Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar*. 2(4), 353–358.
- Faturohmah, T. N., & Salim, T. A. (2022). Perilaku Masyarakat Terhadap Penyebaran Hoax Selama Pandemi Covid-19 Melalui Media di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.29240/tik.v6i1.3432>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- H. W., J. K., Rizkyawan, K. F., Haris, M. Z., Muzaqi, R. K., & Afifah, Y. N. (2022). Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 121–130. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p121-130>
- Ikhsan, M., Z, K., & Sofia, R. (2021). Misinformasi, tantangan pandemi di era digital. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 7(2), 62. <https://doi.org/10.29103/averrous.v7i2.5432>
- Marwan, M. R. (2018). Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia. *UG Jurnal*, 12(2), 16. <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications>
- Masi, W. F. La, Lestaluhu, S., & Bandjar, A. (2022). Pola Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penyebaran Informasi Wabah Covid-19 di Kota Ambon). *Global Communication for All*, 1(1), 30–37. <http://jurnal.csdforum.com/index.php/gca/article/view/gca1106%0Ahttps://jurnal.csdforum.com/index.php/gca/article/viewFile/gca1106/1106>
- Munir, A., & Mubarak, A. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SISTEM REKOMENDASI KONTEN TIKTOK: STUDI KASUS*.
- Rahmadini, R. (2025). *Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Jurnalis di Bangka Belitung dalam Perspektif Etika Jurnalistik*. 1, 1–8.
- Ramadanti, T., Hukum, F., Pembangunan, U., & Jakarta, V. (2024). *ATAS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG DIMANIPULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERBANDINGAN AUSTRALIA DAN SINGAPURA* Tiara Ramadanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. 13(1), 3498–3512.
- Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 98–111. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>